

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
TAHUN ANGGARAN 2021

A. PETUNJUK UMUM

1. Dinas Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3. Nama Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4. Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5. Jumlah Biaya Kegiatan : Rp. 4.533.152.115,-
6. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Januari s/d Desember 2021
7. Kuasa Pengguna Anggaran
 - a. Nama : Eva Susanti, SIP
 - b. Jabatan : Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 - c. Nama : Anwar, S.Sos
 - d. Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
10. Bendahara Pengeluaran
 - a. Nama : Yusri Japriska, SE
 - b. Jabatan : Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
11. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
12. Tolak Ukur Indikator
 - a. Masukan
 - Jumlah Dana : Rp. 4.533.152.115,-
 - Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2021
 - b. Keluaran : Pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan.
 - c. Hasil : Lancarnya administrasi keuangan Perangkat Daerah
13. Rincian Belanja Sub kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021		
Urusan Pemerintahan	:	5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Unit Organisasi	:	5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	:	5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	:	5.03.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	:	Januari sampai Desember 2021
Lokasi Kegiatan	:	Kabupaten Pesisir Selatan
Sumber Dana	:	APBD
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan PD	100%

Masukan	Dana yang dibutuhkan	4.533.152.115,-			
Keluaran	Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan	12 bulan			
Hasil	Lancarnya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh ASN pada BKPSDM					
Rincian Belanja Sub Kegiatan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	
1	2	3	4	5	6= (3*5)
5.1	BELANJA OPERASI				4.533.152.115
5.1.01	BELANJA PEGAWAI				4.533.152.115
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				3.046.086.299
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN				2.291.862.895
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS				2.291.862.895
	(#) Gaji Pokok				2.291.862.895
	(-) Pembayaran Gaji PNS				
	Belanja Gaji Pokok PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Tahun		2.291.862.895	2.291.862.895
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN				176.542.568
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS				176.542.568
	(#) Tunjangan Keluarga				176.542.568
	(-)				
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Tahun		176.542.568	176.542.568
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN				174.567.750
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS				174.567.750
	(#) Tunjangan Jabatan				174.567.750
	(-) Tunjangan Jabatan				
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Tahun		174.567.750	174.567.750
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN				20.328.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS				20.328.000
	(#) Tunjangan Fungsional				20.328.000
	(-) Tunjangan Fungsional				
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Tahun		20.328.000	20.328.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN				79.598.400
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS				79.598.400
	(#) Tunjangan Fungsional Umum				79.598.400
	(-) Tunjangan Fungsional Umum				
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Tahun		79.598.400	79.598.400
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN				109.203.566
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS				109.203.566
	(#) Tunjangan Beras				109.203.566
	(-) Tunjangan Beras				
	Belanja Tunjangan Beras PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Tahun		109.203.566	109.203.566
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN				7.505.566
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjanga Khusus PNS				7.505.566

	(#) Tunjangan PPh				7.505.566
	(-) Tunjangan PPh				
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Tahun		7.505.566	7.505.566
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN				53.760
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS				53.760
	(#) Pembulatan Gaji				53.760
	(-) Pembulatan Gaji				
	Belanja Pembulatan Gaji PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Tahun		53.760	53.760
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN				148.561.098
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS				148.561.098
	(#) Iuran JKN				148.561.098
	(-) Iuran JKN				
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Tahun		148.561.098	148.561.098
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN				5.634.657
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS				5.634.657
	(#) Iuran JKK				5.634.657
	(-) Iuran JKK				
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Tahun		5.634.657	5.634.657
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN				16.903.956
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS				16.903.956
	(#) Iuran JKM				16.903.956
	(-) Iuran JKM				
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Tahun		16.903.956	16.903.956
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN				15.324.083
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS				15.324.083
	(#) Taperum				15.324.083
	(-) Taperum				
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Tahun		15.324.083	15.324.083
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN				
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN				1.487.065.816
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS				1.487.065.816
	(#) TPP				1.487.065.816
	(-) TPP				
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Tahun		1.487.065.816	1.487.065.816
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					4.533.152.115

B. PETUNJUK KHUSUS

1. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dimana dijelaskan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan

pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi badan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan arahan dan petunjuk.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan dengan baik serta peningkatan kinerja ASN, maka perlunya pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah dalam hal pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan setiap bulannya.

2. Struktur Organisasi

Dengan mengacu kepada :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
- b. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
- c. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
- d. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/40/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2021;
- e. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 800.05/09/BKPSDM-2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri *Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan Susunan Organisasi pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran adalah Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan;

- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
- e. Bendahara Pengeluaran adalah Staf Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Tugas dan Kewajiban

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab Program

Penanggung Jawab Program adalah Pengguna Anggaran (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang berada pada lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA - OPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (RKA Perubahan - OPD) untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA - OPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (DPA Perubahan - OPD) serta Anggaran Kas Organisasi Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Mengusulkan Personil Pengelola Keuangan (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran kepada Bupati Pesisir Selatan;
4. Menetapkan* personil Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
5. Menetapkan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan;
6. Mengesahkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan yang memerlukan jasa pihak ketiga;
7. Mengesahkan Petunjuk Operasional (PO) Sub Kegiatan;
8. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
9. Menandatangani Buku Kas Umum setiap bulan;
10. Menandatangani Surat Perintah Tugas dan bagi yang tidak mempunyai KPA sekaligus menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
11. Menyetujui Bukti Pembayaran dan Kwitansi;
12. Mengesahkan SPJ;

13. Menyampaikan Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan kepada Bupati Pesisir Selatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
14. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali;
15. Menyerahkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Bupati;
16. Mengawasi pelaksanaan program/kegiatan;
17. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
18. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
19. Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya;
20. Menyampaikan laporan akhir realisasi fisik dan non fisik serta keuangan kepada PPKD paling lambat 15 hari setelah pekerjaan selesai pada tahun anggaran berjalan untuk pengesahan DPA Perubahan OPD;
21. Melaporkan setiap kekurangan perbendaharaan, keuangan dan barang daerah kepada Bupati baik karena kelalaian maupun karena disengaja pada Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya paling Lambat 7 (tujuh) hari setelah kejadian
22. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan), bertugas membantu Penanggung jawab program melakukan koordinasi dan manajemen dibidang pelaksanaan kegiatan sesuai DPA-OPD, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan, dengan tugas dan kewajiban sbb:

1. Menyusun dan mengajukan RKA-OPD dan RKA Perubahan OPD dibidangnya untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran;
2. Menyusun dan menetapkan DPA-OPD dan DPA Perubahan OPD dibidangnya untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran;
3. Meneliti dan meneruskan usulan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
4. Mengusulkan PPTK kepada Pengguna Anggaran;
5. Meneliti Usulan KAK untuk kegiatan yang memerlukan jasa pihak ketiga;
6. Menyusun Petunjuk Operasional Sub Kegiatan;
7. Menyetujui Bukti Pembayaran dan Kwitansi;
8. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan Kegiatan;
9. Meneliti Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan dari PPTK;
10. Menyetujui/meneliti Permintaan Kebutuhan Biaya Bulanan Kegiatan oleh PPTK;

11. Menandatangani SPPD;
12. Menyusun laporan kegiatan baik fisik maupun keuangan untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran pada minggu kesatu bulan berikutnya;
13. Memeriksa Pencatatan Keuangan yang terkait dengan Pelaksanaan Kegiatan minimal sekali dalam 1 (satu) bulan.

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tugas sbb :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD, dengan tugas sbb :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang/jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
3. Melakukan verifikasi SPP
4. Menyiapkan SPM
5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan
6. Melaksanakan akuntansi OPD, dan
7. Menyampaikan laporan keuangan OPD.

e. Bendahara Pengeluaran

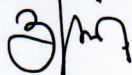
1. Menyiapkan SPP-UP/GU/TU dan LS;
2. Menyerahkan uang kepada PPTK untuk kegiatan persekot kerja sesuai persetujuan Pengguna Anggaran dan dicatat pada Buku Panjar;
3. Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
4. Menerima dan mengecek SPJ dari PPTK untuk diteruskan kepada PPK-OPD;

5. Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada Buku Panjar dan Buku Kas Umum;
6. Membuat Register Pengeluaran Harian dan Menandatangani, serta meneruskan kepada PPK-OPD untuk ditanda tangani;
7. Membuat dan menandatangani Buku Simpanan/Bank;
8. Membuat dan menandatangani Buku Panjar;
9. Membuat dan menandatangani Buku Pajak;
10. Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran;
11. Menandatangani Register Penutupan Kas;
12. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-OPD.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2021

Kuasa Pengguna Anggaran/
Sekretaris Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia



EVA SUSANTI, SIP

NIP. 19721116 200501 2 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/
PPTK



ANWAR, S.Sos

NIP. 19721221 200701 1 001

Disetujui oleh
Pengguna Anggaran/Kepala Badan Kepegawaian
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan



Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681101 198903 1 003

STRUKTUR ORGANISASI
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
TAHUN ANGGARAN 2021

